

## BAB IV

### TANTANGAN DAN HAMBATAN PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DI INDONESIA

#### 1.1 Analisis Tantangan Pendidikan Tinggi Vokasi

Secara garis besar tantangan yang dihadapi pendidikan tinggi vokasi:

1. *Link and Match* dengan industri belum terjadi secara menyeluruh:
  - a. Keterlibatan industri dalam pelaksanaan vokasi masih sangat terbatas. Akreditasi Lembaga vokasi belum melibatkan industri;
  - b. Pengangguran lulusan Vokasi (SMK dan Diploma I/II/III) sebanyak 16,41% dari total pengangguran (BPS 2020);
  - c. Ketertarikan industri bekerjasama dengan vokasi terbatas. Insentif pajak (PP. 45/2019) perlu ditambah dengan insentif keterlibatan yang bermakna.
2. Sarana dan Prasarana
  - a. Fasilitas pendukung praktik belum optimal;
  - b. Perlu penambahan tempat praktik industri bagi siswa di beberapa daerah.
3. Pendidik (Dosen) di lembaga vokasi belum memadai: Dosen Politeknik banyak yang berlatar belakang akademik (70%)
4. Bonus demografi ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia nonproduktif. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas SDM, daya saing, dan kesejahteraan rakyat.

5. Revolusi industri 4.0 yang mengakibatkan perubahan ekonomi, pekerjaan, dan bahkan masyarakat. Tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur, termasuk sistem *cyber-fisik*, *Internet of Things* (IoT), komputasi awan dan komputasi kognitif. Hal tersebut perlu direspons oleh pemerintah melalui program-program kursus dan pelatihan yang mampu menyentuh hingga sendi kehidupan masyarakat

Tantangan pembangunan pendidikan dan kebudayaan berkaca dari permasalahan yang ada, Kemendikbudristek mengidentifikasi 9 (sembilan) tantangan yang dihadapi dalam pemajuan pendidikan berkenaan dengan ekosistem pendidikan, tenaga pendidik, pedagogi, dan kurikulum/program:

1. Memerdekakan pembelajaran sebagai beban menjadi pembelajaran sebagai pengalaman menyenangkan
2. Memerdekakan sistem pendidikan yang tertutup (pemangku kepentingan bertindak sendiri-sendiri) menjadi sistem pendidikan yang terbuka (pemangku kepentingan bekerja sama)
3. Memerdekakan tenaga pendidik/dosen sebagai penerus pengetahuan menjadi tenaga pendidik sebagai fasilitator pembelajaran
4. Memerdekakan pedagogi, kurikulum, dan asesmen yang dikendalikan oleh konten menjadi berbasis kompetensi dan nilai-nilai
5. Memerdekakan pendekatan pedagogi yang bersifat pukul rata (*one size fits all*) menjadi berpusat pada peserta didik dan personalisasi
6. Memerdekakan pembelajaran manual/tatap muka menjadi pembelajaran yang difasilitasi oleh teknologi

7. Memerdekakan program-program pendidikan yang dikendalikan oleh pemerintah menjadi program yang relevan bagi industri
8. Memerdekakan pendidikan yang dibebani oleh perangkat administrasi menjadi bebas untuk berinovasi
9. Memerdekakan ekosistem pendidikan yang dikendalikan pemerintah menjadi ekosistem yang diwarnai oleh otonomi dan partisipasi aktif (*agency*) semua

## **1.2 Tantangan Pendidikan Tinggi Vokasi Dalam Mencetak SDM Berkualitas**

Tantangan yang dihadapi Pendidikan Tinggi Vokasi berkaitan dengan perannya dalam memasok SDM berkualitas dalam jumlah yang cukup bagi kebutuhan sektor industri, pendidikan vokasi menghadapi tantangan dan persoalan berikut:

- a. Program pendidikan vokasi dirasakan bersifat kaku dan kurang lentur terhadap perubahan kebutuhan lapangan kerja. Jenis program studi, materi pendidikan, cara mengajar, media belajar, evaluasi dan sertifikasi lebih banyak ditentukan oleh Pemerintah;
- b. Jumlah dan kapasitas pendidikan vokasi bidang industri relatif kecil dibandingkan jumlah kapasitas total jenis pendidikan tersebut;
- c. Kualitas pendidikan vokasi bidang industri masih perlu ditingkatkan terutama berkaitan dengan kualitas, kuantitas peralatan praktek, dosen dan infrastruktur pendukung lainnya;
- d. Pendidikan vokasi bidang industri perlu lebih disesuaikan dengan kebutuhan nyata dunia industri dan berorientasi kepada kebutuhan pasar kerja yang berubah (*demand driven*).

Berkaitan dengan potensi yang ingin digali dalam rangka untuk memperkuat revitalisasi pendidikan vokasi, terdapat beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi, diantaranya:

- a. Terbatasnya keterlibatan aktif dunia industri dalam pelaksanaan pendidikan vokasi (*real link and match* DUDI);
- b. Tingkat pengangguran lulusan dari pendidikan vokasi masih tinggi;
- c. Kompetensi SDM (Dosen/Instruktur) belum sesuai kebutuhan baik secara internal dalam pendidikan vokasi maupun untuk kebutuhan industri;
- d. Kualitas lulusan dari pendidikan vokasi masih belum memadai sehingga berdampak pada produktivitas tenaga kerja Indonesia relatif rendah;
- e. Pengembangan bidang keahlian pada lembaga kursus dan pelatihan belum sejalan dengan kebutuhan industri serta belum merespon kebutuhan pasar;
- f. Kebijakan “pukul rata” antara universitas dengan politeknik perlu ditinjau ulang, karena:
  - Tridarma untuk ilmu terapan dengan artikel-jurnal banyak perbedaan (walaupun secara substansi sama), perlu ada artikel jurnal dengan aturan khusus yang mengakomodir vokasi/ilmu terapan;
  - Kebanyakan Tridarma penelitian (bukan PKM) hanya sebatas model/teori, belum benar-benar teraplikasi ke industri, untuk publikasi beda pendekatan

Sedangkan dalam rangka revitalisasi pendidikan vokasi, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi tentunya dengan melakukan reformasi pendidikan tinggi vokasi dengan:

1. Semua lembaga pendidikan wajib memiliki kerjasama dan kemitraan dengan DUDI yang pada awalnya dengan membangun kepercayaan industri kepada pendidikan vokasi;
2. Meningkatkan mutu dan kualitas SDM pada pendidikan vokasi, diantaranya dosen/instruktur dengan berbasis kebutuhan industri;
3. Mengembangkan kurikulum, sarana dan prasarana, pola pembelajaran berbasis kebutuhan industri;
4. Mengembangkan konten untuk uji kompetensi serta pemagangan dan penempatan lulusan yang bekerja sama dengan pihak industri;
5. Mengubah pola pikir masyarakat bahwa pendidikan vokasi lebih menarik karena aplikatif, salah satunya dengan menerapkan politeknik sebagai universitas terapan.

### **1.3 Analisis Hambatan Pendidikan Tinggi Vokasi**

Di samping beberapa potensi tersebut di atas dalam melaksanakan pendidikan vokasi lima tahun ke depan masih ditemui beberapa hambatan yang harus bisa diatasi. Walaupun Kemendikbudristek telah memprioritaskan revitalisasi pendidikan vokasi, hasil analisis menunjukkan lulusan vokasi memiliki tingkat pengangguran lebih tinggi dibanding lulusan umum. Seperti lulusan diploma yang memiliki persentase pengangguran lebih tinggi dari pada Universitas. Hambatan tersebut yaitu:

1. Mayoritas tenaga kerja (58,77 persen/72,8 juta) memiliki tingkat pendidikan rendah (lulusan SMP/ sederajat ke bawah) tanpa keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja (BPS, 2019)

2. Sistem pendidikan dan pelatihan vokasi saat ini belum menghasilkan lulusan yang memadai dan memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan dengan keterampilan tinggi
3. Sistem pendidikan menghasilkan cukup banyak lulusan semi-terampil, sementara pasar kerja memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyerap lulusan tersebut
4. Pengembangan bidang keahlian di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi belum sejalan dengan kebutuhan industri dan belum merespon kebutuhan pasar
5. Produktivitas tenaga kerja Indonesia relatif rendah (1,37 persen) jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand (5,28%), Vietnam (4,39%), dan Malaysia (2,16 persen), (Sumber: APO, September 2018)

#### **1.4 Hambatan Eksternal Pendidikan Tinggi Vokasi**

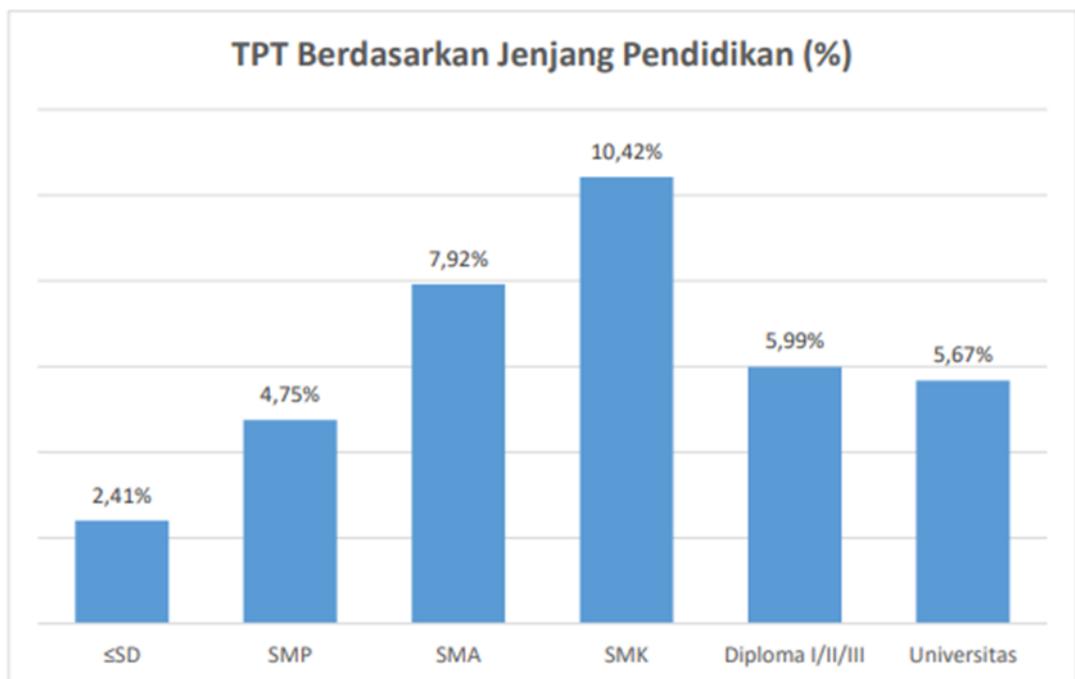
Pembangunan pendidikan vokasi selain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal, juga kondisi eksternal seperti kependudukan, sosial budaya, lingkungan, ekonomi, teknologi, dan politik. Beberapa pengaruh kondisi eksternal terhadap pendidikan vokasi adalah sebagai berikut:

- a. Sosial, Budaya dan Lingkungan. Sebagian besar masyarakat Indonesia beranggapan bahwa lulusan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang memilih meneruskan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tidak dengan *passion* dan visi yang jelas. Bahkan lulusan SMP cenderung terpaksa masuk SMK, atau memiliki pola pikir yang sederhana bahwa dengan masuk ke SMK pasti akan cepat mendapatkan kerja. Padahal

yang dibutuhkan keterampilan, kompetensi dan etos kerja, serta karakter positif dan unggul pada diri lulusan SMK.

- b. Ekonomi. Hasil survei angkatan kerja nasional (sakernas) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa jumlah pengangguran terbuka pada bulan Agustus 2019 mencapai 7.045.800 jiwa, dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) 5,28%, 0,06% poin dibandingkan Agustus 2018. Ini berarti bahwa dari 100 orang Angkatan kerja Indonesia, terdapat 5 orang yang termasuk kategori penganggur.

Gambar 4.1 TPT Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber: Sakernas BPS, Agustus 2019 Gambar 1.9 TPT SMK dan Diploma Tahun 2014 – 2019

Secara umum, berdasarkan hasil sakernas Agustus 2019, TPT untuk pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 10,42%, diikuti oleh lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar

7,92%, Diploma I/II/III) 5,99%, Universitas 5,67%, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 4,75% dan TPT terendah terdapat pada tingkat pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 2,41%. Dengan kata lain ada tenaga kerja yang tidak terserap pada tingkat sekolah menengah, terutama kejuruan. Sementara mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja.

- c. Teknologi. Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Digital teknologi juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui *distance learning*, pemerintahan melalui *e-government*, inklusi keuangan melalui *fintech*, dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya *e-commerce*.

Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya beberapa pekerjaan yang sifatnya manual di dunia. Studi dari *Mckinsey* memperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis *online* belum dibarengi dengan upaya pengoptimalan penerimaan negara serta pengawasan kepatuhan pajak atas

transaksi-transaksi tersebut. Hal ini penting mengingat transaksi digital bersifat lintas negara.

Berangkat dari penerapan tenaga kerja di era industri 4.0 maka yang berada paling depan adalah penguasaan teknologi informasi dengan berbagai perangkat yang dapat mendukung pelaksanaan pekerjaan. Secara sederhana bahwa Industri 4.0 memberi ruang kepada semua orang untuk dapat berinteraksi dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi yang modern. Hal ini kembali kepada dasar pendidikan yang menjadi landasan penggunaan teknologi informasi

d. Politik dan Pertahanan dan Keamanan. Kondisi politik, pertahanan dan keamanan yang mempengaruhi pembangunan pendidikan vokasi dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah:

- ketidakstabilan politik serta pertahanan dan keamanan yang mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam era otonomi daerah dengan terjadinya kepala daerah seringkali berdampak pada pergantian jabatan dan pemangku di bidang pendidikan nonformal dan informal yang berlangsung dengan kurang memperhatikan kualifikasi dan kompetensi yang relevan dengan jabatan yang diemban,
- ketidakselarasan kebijakan dan peraturan perundangan di pusat dan atau daerah yang berdampak pada penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal,
- kebutuhan pendidikan politik untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi,

- implementasi otonomi daerah yang mendorong kemandirian dan berkembangnya kearifan lokal,
- terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam implementasi otonomi daerah,
- keterlambatan penerbitan turunan peraturan perundangan yang berdampak pada bidang pendidikan,
- ancaman disintegrasi bangsa akibat dari ketidakdewasaan dalam berdemokrasi,
- ideologi negara sebagai pemersatu bangsa dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan
- komitmen pemenuhan pendanaan pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (4).